



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUHARSO MONOARFA**
2. Jabatan : **MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS**
3. NHK : **35444**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 89.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1478 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000.000
5. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/70 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 3970 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
8. Bangunan Seluas 142 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 3.031.750.000**

1. MOBIL, JAGUAR XJL2.0 AT SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 815.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.076.750.000



3. MOBIL, LEXUS JEEP H.C. HDTF Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
1.140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.000.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.573.357.226
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	95.405.107.226
III. HUTANG	Rp.	25.611.799.190
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	69.793.308.036

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.